

PERAN PRODUK BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PANYABUNGAN

Ahmad fadhli¹, Jureid², Novi yanti safitri pulungan³, Rina sari⁴, Kholidatun
Napisah⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

ahmadfadhliiii723@gmail.com, jureidmei@gmail.com, pulungannovi@gmail.com,
rinasarisari313@gmail.com, kholidatunnapisah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran produk Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendorong inklusi keuangan melalui pendanaan, pembiayaan, dan layanan jasa. Menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis data sekunder dari BSI, OJK, Bank Indonesia, serta publikasi ilmiah periode 2023–2025, studi ini menilai kontribusi BSI pada perluasan akses keuangan syariah. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan Dana Pihak Ketiga, perluasan pembiayaan UMKM, dan optimalisasi layanan digital seperti BSI Mobile berperan signifikan dalam mempermudah akses layanan keuangan. Namun, di Panyabungan, perkembangan tersebut masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan infrastruktur digital, sehingga pemanfaatan produk belum merata. Keterbatasan data cabang menyebabkan analisis mengacu pada data nasional sebagai dasar. Secara keseluruhan, efektivitas peran produk BSI sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat dan dukungan infrastruktur lokal.

Kata kunci: inklusi keuangan, bank syariah, pembiayaan UMKM, layanan digital, BSI.

Abstrak

This study examines the role of Bank Syariah Indonesia (BSI) products in enhancing financial inclusion through funding, financing, and service-based instruments. Using a qualitative descriptive approach supported by secondary data from BSI, the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and academic publications from 2023–2025, the research evaluates BSI's contribution to expanding access to Islamic financial services. Findings indicate that the growth of third-party funds, broader MSME financing, and the development of digital services such as BSI Mobile significantly support financial inclusion. However, in Panyabungan, challenges related to low Islamic financial literacy and limited digital infrastructure hinder equitable utilization. Due to limited branch-level data, national data serve as the analytical foundation. Overall, the effectiveness of BSI's products depends on community readiness and local infrastructure support.

Kata kunci: Financial inclusion, Islamic banking, MSME financing, digital services, BSI.

1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati layanan keuangan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan masalah yang disebut *financial exclusion*, yaitu ketidakmerataan akses terhadap produk keuangan seperti tabungan, pembiayaan, maupun layanan kredit. Pemerintah sudah berupaya melalui *National Financial Inclusion Strategy* sejak tahun 2016, dengan target inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada berbagai hambatan yang membuat target tersebut sulit tercapai. (Lailiyah et al., 2024)

Dalam situasi ini, bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan alternatif yang menawarkan solusi lebih inklusif. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menjalankan operasional berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan riba. Nilai-nilai tersebut menjadikan produk bank syariah relevan bagi masyarakat yang sebelumnya ragu atau enggan berhubungan dengan sistem keuangan konvensional. Artinya, bank syariah bukan hanya menyediakan layanan finansial, melainkan juga menghadirkan keadilan sosial dan aspek religius yang lebih sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia. (Ferdi Pratama & Muhammad Subhan, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah berperan nyata dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang kesulitan memperoleh modal dari bank konvensional. Melalui produk pembiayaan mikro, bank syariah memberi peluang lebih besar kepada masyarakat menengah ke bawah untuk berkembang. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital turut membuka jalan baru. Kehadiran layanan mobile banking dan platform keuangan syariah berbasis aplikasi membuat akses terhadap layanan perbankan semakin mudah, bahkan di wilayah yang jauh dari kantor cabang. (Aspar, 2023)

Meski begitu, peran bank syariah masih menghadapi sejumlah kendala serius. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas perbedaan produk syariah dan konvensional. Selain itu, pemerataan infrastruktur digital juga masih menjadi masalah, khususnya di daerah pedesaan. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya program literasi dan edukasi keuangan syariah yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya mengenal, tetapi juga percaya pada sistem keuangan syariah. (Fitriyani et al., 2024)

Menurut Bank Indonesia (2023), inklusi keuangan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro, dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki potensi strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah melalui pengembangan dan penyediaan produk-produk syariah yang lebih beragam dan mudah diakses. (Anisak & Bakhri, 2024)

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga turut berperan dalam mempercepat proses inklusi keuangan. Inovasi layanan digital seperti BSI Mobile dan

QRIS Syariah telah memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi dan mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang.⁸ Penelitian Sari dkk. (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan bank syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, terutama pada segmen milenial dan pelaku UMKM. (Masyita Auliyah & Andriani Samsuri, 2025)

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran bank syariah dari sisi teori dan kebijakan umum, bukan dari implementasi nyata di lapangan. Masih sedikit penelitian yang membahas bagaimana produk-produk keuangan syariah mikro, seperti pembiayaan UMKM, tabungan haji, dan layanan digital berbasis BSI Mobile, benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat di tingkat cabang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan yang perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang peran bank syariah dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya dengan mengambil studi kasus di KCP BSI Panyabungan, Mandailing Natal, sebagai contoh penerapan nyata di daerah. (Ferdhi Pratama & Muhammad Subhan, 2024)

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada tingkat nasional atau kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Penelitian yang menyoroti konteks daerah, khususnya wilayah Mandailing Natal, masih sangat terbatas. Padahal, wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda, terutama karena dominasi masyarakat pedesaan dan tingkat literasi keuangan yang relatif rendah. (Aspar, 2023)

Berdasarkan peluang dan tantangan tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana produk bank syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis produk-produk perbankan syariah, baik dari sisi pendanaan, pembiayaan, maupun layanan jasa, sekaligus menelaah hambatan yang dihadapi dalam praktik. Hasil kajian diharapkan mampu memberi masukan bagi pengembangan kebijakan, serta menjadi rujukan praktis bagi bank syariah dalam memperluas layanan keuangan yang inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. (Anisak & Bakhri, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran produk-produk Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah KCP Panyabungan. Kajian ini penting karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas produk keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di tingkat lokal.

2. Kajian Pustaka

2.1. Konsep Inklusi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, mudah dijangkau, dan terjangkau biayanya. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2024), inklusi keuangan merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional karena mampu meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, kebijakan ini diimplementasikan melalui *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*, yang menekankan pentingnya integrasi antara edukasi keuangan, inovasi digital, dan penyediaan layanan keuangan syariah yang merata. (Depkes RI, 2005)

Dalam konteks keuangan Islam, inklusi keuangan syariah didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan yang mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung keadilan dan kemaslahatan sosial. Puspitasari, Mahri, dan Utami (2019) menjelaskan bahwa inklusi keuangan syariah di Indonesia memiliki peran strategis karena tidak hanya menekankan peningkatan akses, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan sosial yang mendorong kesejahteraan umat. Melalui pendekatan ini, keuangan syariah berpotensi memperluas jangkauan layanan perbankan ke segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh sistem keuangan konvensional. (Lailiyah et al., 2024)

2.2. Produk Bank Syariah dan Akad yang Relevan

Produk bank syariah merupakan layanan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta penyediaan jasa keuangan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk penghimpunan dana umumnya menggunakan akad *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil), sedangkan produk pembiayaan menggunakan akad *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *musyarakah* (kerjasama modal), serta *qardhul hasan* (pinjaman tanpa imbalan). Setiap akad memiliki karakteristik hukum dan ekonomi tersendiri yang bertujuan menciptakan keadilan antara nasabah dan bank. Model ini menjadikan bank syariah lebih berorientasi pada kemitraan dan keberlanjutan sosial dibandingkan hanya pada keuntungan finansial semata

Sementara itu, dalam konteks perbankan syariah modern, inovasi produk menjadi aspek penting untuk memperluas inklusi keuangan masyarakat. Pengembangan layanan digital seperti *mobile banking*, *internet banking syariah*, serta penggunaan *fintech syariah* telah mempermudah akses masyarakat ke layanan keuangan tanpa hambatan geografis. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2023) menegaskan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan nasabah di berbagai daerah. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat transparansi akad karena setiap transaksi dicatat secara sistematis dan dapat

diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Inovasi ini terbukti efektif dalam menekan biaya transaksi serta meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor keuangan syariah. Dengan demikian, integrasi antara prinsip syariah dan teknologi digital menjadi faktor kunci bagi bank syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam memperluas akses keuangan dan mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional secara berkelanjutan. (Asandimitra & Novianggie, 2019)

2.3. Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Bank syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional. Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis nilai Islam, bank syariah tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Inovasi produk dan layanan berbasis prinsip syariah, seperti *pembiayaan mikro* dan *tabungan haji*, berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif.

Selain itu, bank syariah juga berperan sebagai katalis dalam mendorong inklusi keuangan melalui penguatan ekosistem keuangan digital. Digitalisasi layanan seperti *mobile banking*, *QRIS Syariah*, dan platform fintech syariah memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan mengakses pembiayaan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Penelitian oleh Tiara, Purwoko & Zulkifli (2023) memperlihatkan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah terbukti mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah rural dengan efisiensi biaya operasional yang lebih baik. (Anggrainie, 2024)

Peran bank syariah dalam inklusi keuangan juga mencakup fungsi edukatif, di mana lembaga keuangan syariah menjadi agen literasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi produk berbasis syariah, BSI berperan aktif memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam. Dengan demikian, peran bank syariah dalam mendorong inklusi keuangan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga transformasional, karena mampu mengubah pola pikir masyarakat menuju sistem ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan. (Widyastuti & Afisa, 2022)

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan Syariah

Keberhasilan inklusi keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berhubungan. Faktor utama yang paling menentukan adalah literasi keuangan syariah, yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip, produk, dan manfaat sistem keuangan Islam. Semakin tinggi literasi masyarakat, semakin besar pula peluang mereka memanfaatkan layanan keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Nasution (2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk perbankan syariah. Rendahnya literasi menyebabkan banyak masyarakat menganggap produk syariah sama dengan konvensional, sehingga menghambat pertumbuhan nasabah baru di daerah-daerah nonperkotaan. Oleh karena itu,

program literasi yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memperluas inklusi keuangan syariah secara nasional. (Puspita, 2024)

Selain literasi, infrastruktur dan teknologi digital juga menjadi faktor penting yang menentukan tingkat inklusi keuangan syariah. Infrastruktur perbankan yang terbatas di daerah pedesaan, seperti minimnya kantor cabang dan akses internet, seringkali menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, kemajuan teknologi keuangan (fintech) memberikan peluang baru untuk memperluas jangkauan layanan syariah melalui aplikasi mobile dan sistem pembayaran digital. (Asandimitra & Novianggie, 2019)

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi, kepatuhan syariah, dan reputasi lembaga. Menurut penelitian Widyastuti dan Afisa (2023), kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah dapat meningkat apabila masyarakat memahami mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjamin setiap transaksi sesuai dengan prinsip Islam. (Widyastuti & Afisa, 2022).

2.5. Penelitian terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, memiliki peran penting dalam meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Puspitasari, Mahri, dan Utami (2019), yang meneliti *Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan perbankan syariah cukup stabil, tingkat inklusi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan inklusi keuangan nasional. Rendahnya literasi, terbatasnya produk kompetitif, dan persepsi masyarakat terhadap kompleksitas akad syariah menjadi penyebab utama. (Fitriyah, 2023)

Penelitian lain oleh Rahmawati dan Tarmizi (2023) juga menguatkan pandangan tersebut. Dalam studinya berjudul *Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Melalui Produk Pembiayaan Mikro*, ditemukan bahwa produk seperti *murabahah mikro* dan *qardhul hasan* berkontribusi besar dalam membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha. Produk-produk ini dinilai efektif karena menawarkan mekanisme yang sederhana dan biaya administrasi rendah, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. (Marwah & Rukiah, 2025)

Selanjutnya, penelitian oleh Widyastuti dan Afisa (2023) menyoroti hubungan antara literasi keuangan syariah, kepercayaan masyarakat, dan penggunaan layanan digital bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi dan kepercayaan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat inklusi keuangan syariah, sementara layanan digital berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan tersebut. Dengan kata lain, masyarakat yang memahami prinsip syariah dan memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan Islam akan lebih mudah mengadopsi teknologi digital dalam bertransaksi. Studi ini relevan bagi konteks BSI KCP Panyabungan karena

menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan digitalisasi dapat menjadi kombinasi kunci untuk memperluas inklusi keuangan syariah di daerah-daerah pedesaan.

2.6. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi inklusi keuangan syariah di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Meskipun pertumbuhan aset bank syariah terus meningkat setiap tahun, sebagian besar masyarakat masih belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (2024) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 39,9%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan umum sebesar 65,4%.

Selain faktor literasi, hambatan infrastruktur dan keterbatasan teknologi juga menjadi kendala signifikan dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah. Di sejumlah daerah seperti Mandailing Natal dan wilayah pedesaan lainnya, keterbatasan jaringan internet dan minimnya kantor cabang membuat masyarakat sulit mengakses layanan keuangan digital. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Belahag, dan Hasanah (2023) menjelaskan bahwa masih banyak nasabah potensial di daerah rural yang belum terlayani secara optimal karena fasilitas elektronik banking belum merata. Padahal, digitalisasi seperti *mobile banking syariah* dan *agen laku pandai* dapat menekan biaya transaksi serta mempercepat distribusi layanan. (Asandimitra & Novianggie, 2019)

Hambatan lainnya terletak pada kurangnya inovasi produk dan daya saing bank syariah dibandingkan bank konvensional. Hal ini menurunkan minat masyarakat terhadap produk berbasis syariah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro. Untuk mengatasi hal tersebut, bank syariah perlu melakukan inovasi berkelanjutan, seperti pengembangan produk digital berbasis kebutuhan lokal, simplifikasi akad, serta peningkatan efisiensi proses layanan. Dengan langkah ini, diharapkan inklusi keuangan syariah dapat tumbuh lebih cepat dan mampu bersaing dengan layanan keuangan konvensional yang lebih mapan. (Marwah & Rukiah, 2025)

2.7. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, konsep inklusi keuangan syariah memperkuat landasan teori ekonomi Islam yang menekankan keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, akses keuangan merupakan bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memperkuat kesejahteraan umat melalui sistem yang bebas dari unsur riba dan gharar. Penelitian oleh Salma Nurul Zahara, Ruhadi, dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap indikator pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, dengan nilai indeks syariah yang masih rendah di banyak provinsi. Dengan demikian, secara teoretis, inklusi keuangan syariah bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga paradigma pembangunan berkeadilan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat. (Zahara et al., 2021)

Secara praktis, inklusi keuangan syariah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di sektor usaha mikro dan kecil. Lembaga seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh bank konvensional. Penelitian oleh Pratama dan Zain (2023) menunjukkan bahwa pengembangan produk digital seperti *BSI Mobile* dan program *Laku Pandai Syariah* meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas jangkauan nasabah, serta menumbuhkan budaya menabung di kalangan masyarakat pedesaan. Dampak praktis ini menegaskan bahwa bank syariah bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga motor pemberdayaan ekonomi yang mendorong keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis syariah. (Zulfa, 2025)

Selain itu, secara praktis, inklusi keuangan syariah juga membawa implikasi besar terhadap peningkatan literasi dan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Literasi keuangan menjadi salah satu fondasi utama keberhasilan inklusi, karena pengetahuan yang memadai membuat masyarakat lebih percaya diri dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, program literasi menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi sosial dan spiritual menuju sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif. (Setiawan & Faisal, 2024)

2.8. Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan hasil kajian literatur dan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa topik mengenai inklusi keuangan syariah telah banyak diteliti, namun sebagian besar masih menyoroiti aspek makro seperti indeks nasional atau literasi keuangan masyarakat secara umum. Sebagian besar studi tersebut belum mengulas secara mendalam bagaimana produk bank syariah diimplementasikan untuk meningkatkan inklusi pada level cabang daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Faisal (2024) menunjukkan bahwa meskipun tingkat literasi keuangan dan fungsi filantropi Islam seperti zakat dan infak memiliki pengaruh positif terhadap praktik inklusi keuangan syariah, dampaknya masih belum merata di daerah pedesaan. (Setiawan & Faisal, 2024)

Selain itu, beberapa penelitian mengungkap bahwa teknologi keuangan syariah atau fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, tetapi implementasi di lapangan masih terbatas dan belum banyak dikaji secara spesifik dalam konteks produk bank syariah cabang daerah. Misalnya, penelitian oleh Zulfa (2024) menunjukkan bahwa fintech syariah mampu memperluas akses layanan keuangan bagi UMKM berbasis syariah di Indonesia, namun literasi digital dan dukungan regulasi masih menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat gap penelitian yang belum terisi, yaitu bagaimana produk bank syariah di tingkat cabang — termasuk inovasi digital dan kemitraan fintech — secara konkret berkontribusi terhadap inklusi keuangan masyarakat lokal, terutama di wilayah pedesaan seperti Panyabungan.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti peran produk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Fokus penelitian ini tidak hanya pada identifikasi produk, tetapi juga pada analisis efektivitas dan dampak sosial ekonomi dari penggunaan produk tersebut terhadap masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pemahaman yang lebih dalam tentang strategi produk bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di tingkat mikro, serta kontribusi praktis bagi lembaga perbankan syariah dalam merancang kebijakan pengembangan produk yang lebih inovatif, adaptif, dan berkeadilan. Dengan cara ini, penelitian ini berperan sebagai penghubung antara teori ekonomi Islam dan praktik inklusi keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

3. Metode Penelitian (bold 12 pt)

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana produk-produk Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui kegiatan pendanaan, pembiayaan, dan layanan jasa.

Objek penelitian ini adalah peran produk Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, dengan fokus pada kegiatan pendanaan (funding), pembiayaan (financing), dan layanan jasa (services) pada BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu cabang aktif BSI di wilayah Mandailing Natal yang memiliki potensi besar dalam pengembangan produk keuangan syariah di daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber resmi yang telah dipublikasikan dan dapat diakses secara daring. Sumber data tersebut meliputi laporan tahunan dan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait statistik perbankan syariah, laporan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Analisis dalam penelitian ini menggunakan data nasional sebagai dasar karena keterbatasan data spesifik dari BSI KCP Panyabungan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, menyajikan data secara terstruktur, dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara teori dan hasil temuan dari data sekunder. Analisis dilakukan untuk menggambarkan secara jelas peran produk-produk BSI dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan produk syariah di wilayah Panyabungan.

4. Hasil dan Pembahasan (bold 12 pt)

Bank syariah Indonesia KCP Panyabungan merupakan kantor cabang pembantu BSI yang berlokasi di Jl. Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan II, kecamatan Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal, Indonesia. Kantor ini melayani nasabah mulai dari pembuatan rekening hingga penyediaan fasilitas keuangan termasuk produk pendanaan (tabungan dan investasi), pembiayaan seperti pinjaman/kredit, dan layanan lainnya.

Visi Bank Syariah Indonesia adalah “Menjadi Top 10 Global Islamic” dan misinya yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dengan Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan Valuasi kuat (PB >2), dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Aspek utama produk bank syariah, yaitu pendanaan (funding), pembiayaan (financing), dan layanan (service). Ketiga aspek ini merupakan langkah operasional dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah terkhusus di kecamatan Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal melalui Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan.

1. Pendanaan (Funding)

Pendanaan di BSI dilaksanakan melalui penghimpunan dana masyarakat melalui akad syariah, seperti akad wadiah (titipan amanah) dan mudharabah (bagi hasil). Data BSI menunjukkan peningkatan signifikan dana yang dihimpun dari berbagai segmen masyarakat, khususnya tabungan dan deposito syariah.

2. Pembiayaan (Financing)

Akan pembiayaan seperti murabahah, (jual beli), ijarah (sewa), musyarakah (kerja sama modal), dan qhardul hasan (pinjaman kebaikan).

3. Layanan (service)

Di wilayah Panyabungan, tantangan literasi keuangan syariah masih cukup menonjol. Sebagian masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara produk perbankan syariah dan konvensional, khususnya terkait mekanisme akad, sistem bagi hasil, dan manfaat sosial ekonomi dari penggunaan layanan keuangan syariah. Minimnya pengetahuan ini membuat sebagian besar masyarakat masih ragu memanfaatkan produk pembiayaan maupun tabungan syariah yang disediakan oleh BSI KCP Panyabungan.

Dari sisi akses, hambatan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur digital di beberapa desa sekitar Panyabungan. Kualitas jaringan internet yang belum stabil mengakibatkan pemanfaatan layanan digital seperti BSI Mobile belum optimal, padahal layanan tersebut dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor cabang. Hambatan literasi dan akses ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan inklusi keuangan syariah di Panyabungan memerlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan penguatan infrastruktur pendukung agar layanan BSI dapat digunakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan dalam mendukung perluasan inklusi keuangan masyarakat Indonesia melalui tiga instrumen utama, yaitu pendanaan (funding), pembiayaan (financing), dan layanan jasa (service). Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder yang dipublikasikan secara resmi oleh BSI dan regulator keuangan nasional pada periode 2023–2025.

Upaya BSI dalam mengembangkan layanan keuangan berbasis syariah di tingkat nasional memberikan gambaran mengenai potensi pertumbuhan layanan serupa pada level daerah, termasuk wilayah Mandailing Natal. Oleh karena itu, analisis data nasional ini digunakan sebagai landasan dalam melihat kontribusi BSI terhadap inklusi keuangan secara umum.

1. Pendanaan (Funding)

Pendanaan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menabung dan menyimpan dana pada lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi indikator penting meningkatnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan formal.

Tabel 4.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Nasional BSI

Tahun	DPK (Dana Pihak Ketiga)	Pertumbuhan
2024	Rp 312 triliun	–
2025	Rp 319 triliun	2,24%

DPK didominasi oleh dana murah (CASA) yang terdiri dari tabungan dan giro, menandakan semakin banyak masyarakat yang aktif bertransaksi dan menggunakan fasilitas simpanan. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan BSI dalam memperluas akses masyarakat kepada layanan keuangan syariah.

Selain itu, peningkatan aset dan dana kelolaan BSI mendukung tujuan sistem keuangan yang stabil dan inklusif, serta mencerminkan peran strategis bank syariah dalam struktur keuangan nasional.

2. Pembiayaan (Financing)

Pembiayaan merupakan aspek penting inklusi keuangan karena menyediakan akses permodalan, khususnya bagi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penggerak besar ekonomi lokal di banyak daerah di Indonesia.

Tabel 4.2. Pembiayaan UMKM Nasional BSI

Tahun	Total pembiayaan UMKM	Pertumbuhan
2024	Rp 47,71 triliun	–

2025	Rp 52,01 triliun	9,01% YoY
------	------------------	-----------

Pertumbuhan positif ini menunjukkan bahwa BSI semakin memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha produktif serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Pembiayaan syariah juga memberikan pilihan akad yang beragam serta lebih adil karena berlandaskan prinsip bagi hasil dan kemitraan usaha.

3. Layanan Jasa (Service / Digital Banking)

Digitalisasi layanan perbankan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan inklusi keuangan, khususnya di wilayah yang belum memiliki jangkauan kantor cabang fisik.

Tabel 4.3. Perkembangan Layanan Digital BSI Mobile

Indikator	2023	2024
Pengguna BSI Mobile	±5,juta pengguna	±7,12 juta pengguna
Volume Transaksi	±200juta transaksi	±247,32 juta transaksi
Nilai Transaksi	Rp 250 triliun+	Rp 298,82 triliun

Jumlah pengguna dan transaksi BSI Mobile mengalami peningkatan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa layanan digital menjadi ujung tombak perluasan akses keuangan syariah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi kapan saja dan dari mana saja. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan BSI dalam mengakselerasi transformasi digital untuk memperkuat inklusi keuangan nasional. (*BANK SYARIAH INDONESIA*, 2024)

Dari ketiga instrumen utama di atas, dapat diidentifikasi beberapa pencapaian strategis:

1. Akses dana simpanan semakin luas, mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah
2. Pelaku UMKM semakin mudah mendapatkan pembiayaan syariah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha
3. Transformasi digital mempercepat penetrasi layanan keuangan, terutama di wilayah yang jauh dari jaringan cabang bank

Pencapaian ini tidak hanya mempercepat inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Meskipun pertumbuhan signifikan terjadi, terdapat beberapa tantangan:

1. Literasi keuangan syariah sebagian masyarakat masih rendah
2. Infrastruktur jaringan digital belum merata di seluruh wilayah

3. Pemanfaatan akad syariah masih terpusat pada jenis-jenis tertentu

4.2. Pembahasan

Pembahasan ini mengelaborasi hasil penelitian pada bagian sebelumnya dengan menghubungkan data empiris dan konsep inklusi keuangan syariah. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan UMKM, serta layanan digital BSI menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan akses masyarakat pada sistem keuangan formal berbasis syariah.

Peningkatan DPK setiap tahun mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap bank syariah. Hal ini mendukung tujuan inklusi keuangan, yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan layanan tabungan dan transaksi perbankan untuk aktivitas ekonomi sehari-hari. Pada tahun 2025, DPK nasional BSI mencapai sekitar Rp 319 triliun, meningkat 2,24% YoY. Pertumbuhan tersebut menunjukkan stabilitas fungsi intermediasi bank serta keberhasilan BSI dalam mendorong masyarakat menggunakan instrumen simpanan syariah.

Selain aspek pendanaan, peningkatan pembiayaan UMKM sebesar 9,01% YoY menunjukkan bahwa BSI mendukung pemulihan dan perluasan akses modal usaha produktif. Dalam perspektif maqashid syariah, pembiayaan ini berperan dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui aktivitas ekonomi halal. Akses pembiayaan formal juga membantu mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap sumber modal non-formal yang tidak aman.

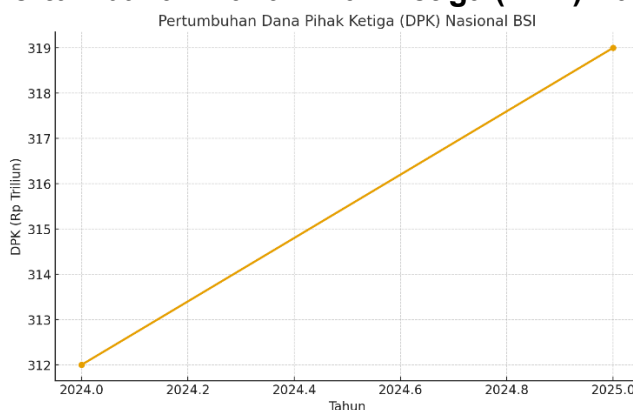
Pada aspek layanan jasa, peningkatan jumlah pengguna BSI Mobile menunjukkan pergeseran perilaku masyarakat menuju sistem keuangan digital. Transformasi digital dalam layanan perbankan menghilangkan hambatan geografis sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik. Dengan demikian, layanan digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam percepatan inklusi keuangan.

Secara umum, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa BSI berperan sebagai penggerak inklusi keuangan nasional melalui:

1. Ekspansi kepemilikan rekening bank syariah
2. Peningkatan akses pembiayaan sektor produktif
3. Pemanfaatan teknologi untuk pemerataan layanan keuangan

Namun, implementasi inklusi keuangan di daerah seperti Kabupaten Mandailing Natal masih memiliki kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan infrastruktur internet. Oleh karena itu, meskipun potensi pertumbuhan cukup besar, dukungan edukasi dan penetrasi layanan digital tetap diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat ekosistem keuangan syariah secara merata.

4.1. Gambar 1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Nasional BSI



(Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2024)

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam peningkatan inklusi keuangan nasional melalui tiga instrumen utama, yaitu pendanaan, pembiayaan, dan layanan jasa digital. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahun menjadi indikator meningkatnya partisipasi masyarakat menabung pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan UMKM yang terus bertumbuh menunjukkan akses modal semakin terbuka bagi sektor produktif, sehingga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, pertumbuhan jumlah pengguna layanan digital seperti BSI Mobile mengindikasikan terjadinya percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan fisik perbankan.

Dengan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BSI berperan dalam memperluas akses keuangan yang lebih merata dan sesuai prinsip syariah. Namun, implementasi di tingkat daerah seperti Mandailing Natal tetap menghadapi kendala literasi keuangan syariah dan pemerataan infrastruktur digital yang belum optimal.

Saran

1. BSI perlu meningkatkan program literasi keuangan syariah berbasis komunitas, terutama di daerah yang tingkat inklusi keuangannya masih rendah.
2. Pemerataan infrastruktur layanan digital perlu memperhatikan daerah terpencil agar pelayanan keuangan syariah dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
3. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data primer pada tingkat cabang, khususnya BSI KCP Panyabungan, agar hasil lebih kontekstual dan akurat dalam menggambarkan kondisi wilayah Mandailing Natal.
4. Kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah perlu ditingkatkan untuk memperkuat akses pembiayaan produktif UMKM.

6. Daftar Pustaka

- Anggrainie, A. (2024). Digitalisasi sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan Bank. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(11), 653660.
- Anisak, A., & Bakhri, S. (2024). Peran dan Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Produk Mikro Syariah. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 79–83. <https://doi.org/10.61401/relevansi.v8i2.151>
- Asandimitra, N., & Novianggie, V. (2019). The Influence of Behavioral Bias, Cognitive Bias, and Emotional Bias on Investment Decision for College Students with Financial Literacy as the Moderating Variable. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(2), 92–107.
- Aspar. (2023). *Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Kota Palopo*. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8152/1/ASPAR.pdf>
- BANK SYARIAH INDONESIA. (2024).
- Depkes RI. (2005). Strategi Nasional PP-ASI. *Researchgate.Net*. https://www.researchgate.net/profile/Tuti-Herawati/publication/269039074_Strategi_Nasional_Penelitian_Agroforestri/links/547e3e200cf2de80e7cc5510/Strategi-Nasional-Penelitian-Agroforestri.pdf
- Ferdi Pratama, & Muhammad Subhan. (2024). Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(3), 01–09. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i3.1544>
- Fitriyah, et al. (2023). 2 3 123. *Artikel Ilmiah Nurul*, 5(2), 25–33.
- Fitriyani, P., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Keuangan Di Indonesia the Role of Islamic Banking in Increasing Financial. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7324–7331.
- Lailiyah, M., Sari, H. M., & Wulandari, D. A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peran Bank Umum Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia*. 2, 93–98.
- Marwah, D., & Rukiah. (2025). Mengadaptasi Kebutuhan Finansial Milenial Digital. *Islamic Science*.
- Masyita Auliyah, & Andriani Samsuri. (2025). Adopsi Financial Technology oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2218–2227. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8042>
- Puspita, N. (2024). Pelatihan Literasi Keuangan Syariah bagi Masyarakat Desa dalam Mengelola Keuangan Keluarga di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Tahun 2024. *Al-Fattah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 1(2), 46–50. <https://ejournal.alfattah.ac.id/index.php/jpm/article/view/53>
- Setiawan, A., & Faisal, F. (2024). The effect of financial literacy and social philanthropy functions on Islamic financial inclusion practices. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 8(2, special issue), 257–264. <https://doi.org/10.22495/cgobrv8i2sip1>

- Widyastuti, E., & Afisa, I. (2022). Analisis Determinan Inklusi Keuangan Syariah Pada Generasi Milenial Di Kota Salatiga. *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3), 1693–1706.
<https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i3.21906>
- Zahara, S. N., Ruhadi, R., & Setiawan, S. (2021). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(1), 164–177.
<https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2875>
- Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 5(1), 36–41.
<https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311>